



JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN HUMANIORA

Available online at <https://teewanjurnal.com/index.php/carong>

eISSN 3089-2082 & pISSN 3089-3674

Vol. 2, No. 1, Tahun 2025

Hal. 60-69

[doi.org/10.62710/nyhzej02](https://doi.org/10.62710/nyhzej02)

## Pembaharuan Muhammad Bin Abdul Wahhab di Arab Saudi Sebagai Gerakan Reformasi dan Ideologi Negara

Nelli Nafeeza<sup>1</sup>, Sri Suyanta<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry<sup>2</sup>

\*Email Korespodensi: [nellinafeeza@gmail.com](mailto:nellinafeeza@gmail.com)

### ABSTRACT

#### Sejarah Artikel:

Diterima 28-06-2025

Disetujui 02-07-2025

Diterbitkan 04-07-2025

*This article discusses the religious reform initiated by Muhammad ibn Abd al-Wahhab in the Arabian Peninsula during the 18th century. Motivated by concerns over religious practices that were considered to deviate from the principle of tawhid (monotheism), he pioneered the Wahhabi movement, which aimed to restore Islam to its pure teachings based on the Qur'an and Sunnah. This movement had significant influence not only in theological aspects but also politically through its alliance with Muhammad ibn Saud, which led to the establishment of the First Saudi State and laid the foundation for the formation of the Kingdom of Saudi Arabia. The main issue addressed in this article is how the reformist ideas of Wahhabism influenced the socio-religious and political structures of the Arabian Peninsula, and how this ideology has endured and transformed into the present day. The article employs a historical-critical approach, analyzing both primary and secondary sources, including religious texts, historical documents, and relevant modern academic literature. The analysis reveals that Wahhabism has played a major role in shaping a conservative and centralized Islamic identity in Saudi Arabia. Furthermore, it succeeded in building a strong state structure but has also drawn criticism for limiting space for diversity within Islamic thought. This study recommends the need for open inter-sectarian dialogue and a more contextual reinterpretation of Wahhabi teachings to remain relevant in addressing global socio-religious dynamics in the 21st century.*

**Keywords:** Wahhabism; Muhammad ibn Abd al-Wahhab; religious reform ; state ideology

### ABSTRAK

Artikel ini membahas pembaharuan keagamaan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di Jazirah Arab pada abad ke-18. Berangkat dari kegelisahan terhadap praktik-praktik keagamaan masyarakat yang dianggap menyimpang dari prinsip tauhid, ia merintis gerakan Wahhabiyah yang berupaya mengembalikan Islam kepada ajaran murni berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Gerakan ini tidak hanya berpengaruh dalam aspek teologis, tetapi juga politik

melalui aliansinya dengan Muhammad bin Saud, yang kemudian melahirkan Negara Saudi Pertama dan menjadi pondasi pembentukan Kerajaan Arab Saudi. Permasalahan utama yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana gagasan pembaruan Wahhabisme memengaruhi struktur sosial-keagamaan dan politik di Jazirah Arab, serta bagaimana ideologi ini bertahan dan bertransformasi hingga masa kini. Artikel ini menggunakan pendekatan historis-kritis, dengan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk teks keagamaan, dokumen sejarah, serta literatur akademik modern yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Wahhabisme memiliki dampak besar dalam membentuk identitas keislaman Arab Saudi yang bersifat konservatif dan sentralistik. Selain itu, ideologi ini berhasil menciptakan struktur negara yang kuat, namun juga menuai kritik karena dianggap menutup ruang bagi keberagaman pemikiran Islam. Saran dari penelitian ini adalah perlunya dialog terbuka antarmazhab dan reinterpretasi ajaran Wahhabi yang lebih kontekstual agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial-keagamaan global di abad ke-21.

**Kata kunci:** Wahhabisme; Muhammad bin Abdul Wahhab; reformasi; ideologi negara

---

## PENDAHULUAN

Pada abad ke-18, dunia Islam mengalami kemunduran dalam berbagai bidang, baik politik, sosial, maupun keagamaan. Kekuasaan politik Islam yang dulunya luas telah terfragmentasi, sementara praktik keagamaan umat Islam banyak yang bercampur dengan unsur-unsur lokal yang tidak selaras dengan prinsip tauhid murni. Dalam konteks ini, muncul seruan untuk melakukan pembaruan (*tajdid*) yang bertujuan untuk mengembalikan ajaran Islam kepada sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Pembaruan ini menjadi bagian penting dari dinamika intelektual dan spiritual Islam dalam menghadapi krisis internal dan tantangan eksternal

Wahhabisme, sebagai gerakan reformasi keagamaan, telah memainkan peran penting dalam sejarah Islam dan pembentukan negara Arab Saudi. Gerakan ini dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama asal Najd yang menolak praktik-praktik keagamaan masyarakat setempat yang dianggap menyimpang dari prinsip tauhid (monoteisme murni). Ia menyerukan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta menentang bentuk-bentuk bid'ah, syirik, dan khurafat yang menurutnya merusak kemurnian Islam

Salah satu tokoh sentral dalam gerakan pembaruan ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab (1703–1792), seorang ulama asal Najd, Jazirah Arab. Ia mengembangkan pandangan yang menekankan pentingnya kemurnian tauhid dan menolak segala bentuk praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang autentik. Pemikirannya mengusung semangat purifikasi agama, yang menjadi dasar gerakan Wahhabiyah. Gerakan ini bukan hanya memiliki pengaruh teologis, tetapi juga berimplikasi sosial dan politik yang besar di kawasan Jazirah Arab

Gerakan Wahhabiyah memperoleh kekuatan politik ketika Muhammad bin Abdul Wahhab menjalin aliansi dengan Muhammad bin Saud pada tahun 1744, yang menandai lahirnya kekuatan religio-politik baru di Jazirah Arab. Aliansi ini dikenal dengan "Perjanjian Diriyah" dan menjadi fondasi lahirnya Negara Saudi Pertama. Wahhabisme sejak saat itu tidak hanya menjadi gerakan religius, tetapi juga bertransformasi menjadi ideologi negara yang melekat dalam sistem pemerintahan Arab Saudi modern.

Sebelum munculnya gerakan ini, masyarakat di Jazirah Arab berada dalam kondisi yang secara spiritual dinilai mengalami dekadensi. Banyak masyarakat melakukan praktik ziarah kubur, tawassul, penggunaan jimat, dan bentuk-bentuk penghormatan berlebihan kepada para wali yang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dianggap sebagai bentuk kemusyrikan. Ia menilai bahwa Islam telah bercampur dengan kebiasaan dan kepercayaan lokal yang mengaburkan inti ajaran tauhid.

Dalam karya utamanya *Kitab at-Tauhid*, Muhammad bin Abdul Wahhab menulis: "*Segala bentuk pengagungan terhadap selain Allah yang menyerupai ibadah adalah syirik yang harus diberantas.*" Pandangan ini menjadi fondasi bagi misi reformasi keagamaannya dan menjadi titik awal penolakannya terhadap berbagai bentuk tradisi lokal yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, gerakan ini bertujuan bukan untuk membuat inovasi baru, melainkan untuk menghapus unsur-unsur bid'ah yang telah merusak ajaran Islam yang asli.

Situasi sosial-politik Jazirah Arab saat itu pun mendukung munculnya gerakan pembaruan. Kawasan ini belum memiliki otoritas sentral yang kuat, dan konflik antar suku sering terjadi. Dalam konteks inilah Muhammad bin Abdul Wahhab menjalin aliansi politik dengan Muhammad bin Saud, penguasa Dir'iyah, pada tahun 1744. Aliansi ini menjadi kekuatan utama dalam penyebaran dakwah Wahhabi, yang kemudian membentuk cikal bakal Negara Saudi Pertama.

Sebagaimana dicatat oleh David Commins, "aliansi antara da'i dan amir ini merupakan titik balik dalam sejarah Islam di Jazirah Arab dan menandai lahirnya negara berbasis ideologi Wahhabiyah". Pengaruh ideologi Wahhabi tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga menjalar ke dalam struktur pemerintahan, sistem hukum, pendidikan, dan kehidupan sosial di wilayah kekuasaan Saudi. Oleh karena itu, memahami pembaruan Muhammad bin Abdul Wahhab tidak dapat dilepaskan dari konteks historis-politik berdirinya Arab Saudi.

Judul "*Wahhabisme sebagai Gerakan Reformasi dan Ideologi Negara: Kajian Historis atas Pengaruhnya di Arab Saudi*" didasari pada pentingnya memahami relasi antara agama dan kekuasaan dalam pembentukan negara, serta dampaknya terhadap tatanan sosial dan identitas keislaman kontemporer.

Artikel ini akan menggunakan pendekatan historis-kritis untuk menelusuri perkembangan Wahhabisme dari masa awal hingga perannya sebagai ideologi negara. Metode yang digunakan meliputi studi pustaka terhadap sumber primer seperti *Kitab at-Tauhid*, serta analisis atas literatur sekunder yang relevan. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Wahhabisme membentuk kebijakan negara, respon masyarakat terhadapnya, serta kritik-kritik yang muncul dari dalam maupun luar dunia Islam.

Ruang lingkup artikel ini adalah untuk mengkaji kontribusi pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam konteks sejarah dan kebudayaan Arab Saudi. Artikel ini akan menganalisis pemikiran teologis yang melandasi gerakannya, strategi politik yang digunakan dalam penyebaran ajaran, serta pengaruh jangka panjangnya terhadap identitas keislaman dan sistem pemerintahan di Arab Saudi. Selain itu, artikel juga akan mengulas berbagai kritik terhadap Wahhabisme dan bagaimana gerakan ini dipersepsikan dalam wacana Islam kontemporer.

Dengan pendekatan historis-kritis, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana reformasi keagamaan yang dirintis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menjadi salah satu pilar utama pembentukan Arab Saudi modern. Dari sini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara teologi, kekuasaan, dan reformasi sosial dalam sejarah Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kritis dengan menganalisis teks-teks utama seperti *Kitab at-Tawhid* karya Muhammad bin Abdul Wahhab dan dokumen sejarah terkait. Langkah-langkah penelitian meliputi: Identifikasi Sumber Primer dan Sekunder dengan Mengumpulkan karya-karya Muhammad bin Abdul Wahhab dan literatur sejarah terkait. Analisis Kontekstual yaitu Meneliti latar belakang sosial dan politik Jazirah Arab pada abad ke-18. Kemudian Evaluasi Dampak Sosial-Politik dengan Menganalisis pengaruh Wahhabisme terhadap struktur sosial dan politik Arab Saudi. Dan Kritik Reinterpretasi yaitu Mengevaluasi kritik terhadap Wahhabisme dan relevansinya dalam konteks kontemporer.

Dengan pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Wahhabisme membentuk dan terus mempengaruhi struktur sosial dan politik Arab Saudi, serta relevansinya dalam konteks keislaman kontemporer.

## **METODE PELAKSANAAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis, yang bertujuan untuk menggali dan memahami proses pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam konteks sosial, politik, dan keagamaan di Jazirah Arab abad ke-18. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah peristiwa masa lalu yang memiliki pengaruh berkelanjutan hingga pembentukan struktur keislaman dan negara di Arab Saudi modern.

Metode historis memberikan kerangka untuk menelusuri kondisi sosial-keagamaan yang melatarbelakangi lahirnya gerakan Wahhabiyah serta strategi yang digunakan untuk menyebarkan ajarannya. Dengan cara ini, pemikiran dan tindakan Muhammad bin Abdul Wahhab tidak hanya dipahami sebagai refleksi teologis semata, tetapi juga sebagai respon terhadap situasi sosial yang dinilai mengalami penyimpangan dari nilai-nilai tauhid.

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (library research), yakni dengan menelaah literatur primer dan sekunder yang relevan. Sumber primer meliputi karya asli Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti *Kitab at-Tauhid*, serta dokumen sejarah yang berkaitan dengan aliansinya bersama Muhammad bin Saud. Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, dan tulisan akademik dari para pemikir seperti David Commins, Fazlur Rahman, Khaled Abou El Fadl, dan Nasr Hamid Abu Zayd

Dalam menganalisis data, penelitian ini mengacu pada pendekatan hermeneutika historis, yakni metode interpretasi yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik dari teks atau gagasan yang dikaji. Dengan metode ini, doktrin Wahhabiyah dianalisis tidak hanya dari sisi teologis, tetapi juga dalam konteks relasi kekuasaan dan situasi masyarakat saat itu.

Pemahaman terhadap gerakan keagamaan seperti Wahhabiyah memerlukan pembacaan kontekstual terhadap teks dan sejarahnya. Nasr Hamid Abu Zayd, misalnya, menekankan pentingnya pendekatan humanistik dan rasional dalam memahami teks agama agar tetap relevan dengan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap ajaran Islam harus mempertimbangkan dinamika masyarakat dan realitas sejarah.

John Tosh menyatakan bahwa metode sejarah tidak hanya bertugas merekam fakta, melainkan juga menafsirkan makna dari tindakan dan ide manusia di masa lalu. Dalam konteks ini, pemikiran Wahhabiyah dilihat sebagai ekspresi dari proses sosial dan pemikiran yang berusaha menanggapi krisis spiritual dan ketidakstabilan masyarakat Jazirah Arab kala itu.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap kontribusi Muhammad bin Abdul Wahhab dalam upaya pembaruan Islam serta pengaruhnya terhadap pembentukan sistem keagamaan dan politik Arab Saudi. Penelitian ini juga memberi ruang reflektif untuk melihat bagaimana gerakan Wahhabiyah menjadi bagian dari arus besar reformasi dalam Islam yang memiliki dimensi kompleks dan berlapis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Singkat Muhammad bin Abdul Wahhab**

Muhammad bin Abdul Wahhab lahir pada tahun 1703 M di 'Uyainah, sebuah kota kecil di wilayah Najd, Jazirah Arab. Ia berasal dari keluarga ulama terkemuka; ayahnya, Abdul Wahhab bin Sulaiman, adalah seorang hakim dan ahli fikih Mazhab Hanbali. Sejak usia dini, Muhammad bin Abdul Wahhab telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap studi keislaman. Ia belajar Al-Qur'an, hadis, fikih, dan tauhid dari lingkungan keluarganya sebelum melanjutkan pendidikannya ke Madinah, di mana ia mempelajari berbagai cabang ilmu keislaman secara lebih luas.

Dalam proses pendidikannya, Muhammad bin Abdul Wahhab sangat dipengaruhi oleh ajaran para ulama Hanbali, terutama Ibn Taimiyah (1263–1328) dan muridnya Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1292–1350). Kedua tokoh ini dikenal dengan kritik kerasnya terhadap praktik-praktik yang dianggap menyimpang dari kemurnian ajaran Islam, seperti pengkultusan tokoh suci dan penggunaan jimat. Pemikiran mereka mendorong upaya pemurnian aqidah dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah secara ketat serta penolakan terhadap *taqlid* buta terhadap mazhab. Warisan intelektual inilah yang kemudian menjadi fondasi utama dalam gagasan reformasi keagamaan yang dirintis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Kegelisahan intelektualnya semakin berkembang ketika ia melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Jazirah Arab, seperti Hijaz dan Basrah, tempat ia menyaksikan beragam praktik keagamaan masyarakat Muslim yang menurutnya telah menyimpang dari tauhid. Ia menyaksikan fenomena seperti ziarah kubur yang berlebihan, permohonan doa kepada wali, serta penggunaan jimat yang dianggap mengandung unsur syirik. Pengalaman ini memperkuat keyakinannya akan pentingnya gerakan pembaruan yang berfokus pada purifikasi ajaran Islam. Ia kemudian memulai dakwahnya dengan mengajak masyarakat untuk meninggalkan tradisi-tradisi tersebut dan kembali kepada ajaran Islam yang ia yakini lebih murni.

## **2. Konsep Pembaruan dalam Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab**

Konsep pembaruan (*tajdid*) dalam pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab berpusat pada pemurnian tauhid dan penghapusan praktik-praktik keagamaan yang dianggap menyimpang. Ia tidak memandang pembaruan sebagai inovasi (*bid'ah*) dalam agama, melainkan sebagai upaya mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam *Kitab at-Tauhid*, ia menegaskan bahwa "segala bentuk pengagungan terhadap selain Allah yang menyerupai ibadah adalah syirik yang harus diberantas." Pemikiran ini memperlihatkan pendekatan reformis yang sangat keras terhadap praktik-praktik seperti ziarah kubur, tawassul, dan pemujaan terhadap wali.

Muhammad bin Abdul Wahhab memandang bahwa sebagian besar umat Islam pada masanya telah jatuh ke dalam praktik *syirik khafi* (kesyirikan tersembunyi), akibat pengaruh lokalitas budaya dan ketidaktahuan terhadap prinsip dasar Islam. Oleh karena itu, pembaruannya diarahkan pada pendidikan akidah yang ketat, dengan menolak *taqlid* buta terhadap mazhab dan menyerukan penggunaan akal dalam memahami sumber-sumber utama agama. Ia juga mengecam segala bentuk *bid'ah* (inovasi dalam urusan ibadah), yang menurutnya menjadi sumber penyimpangan terbesar umat Islam.

Dalam banyak hal, konsep pembaruannya memiliki kemiripan dengan pemikiran Ibn Taimiyah, yang juga mengutamakan tauhid dan menyuarakan pentingnya jihad melawan kesyirikan. Namun, berbeda dari Ibn Taimiyah yang lebih banyak berfokus pada aspek intelektual, gerakan Wahhabi berkembang menjadi gerakan sosial-politik yang didukung kekuatan militer. Dengan demikian, gagasan pembaruan yang diusung oleh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak bersifat normatif semata, tetapi juga aplikatif dalam konteks sosial dan politik Arab abad ke-18.

## **3. Aliansi Politik dan Penyebaran Wahhabisme**

Keberhasilan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab tidak dapat dipisahkan dari aliansi politik yang ia jalin dengan Muhammad bin Saud, penguasa wilayah Dir'iyah, pada tahun 1744. Persekutuan antara ulama dan penguasa ini menjadi fondasi awal terbentuknya Negara Saudi Pertama, yang menandai masuknya pemikiran Wahhabi ke dalam ranah kekuasaan politik. Muhammad bin Abdul Wahhab menyediakan landasan ideologis dan keagamaan, sementara Muhammad bin Saud memberikan dukungan militer dan perlindungan politik bagi gerakan dakwah tersebut.

Aliansi ini menciptakan sinergi yang memungkinkan dakwah Wahhabiyah menyebar secara luas, tidak hanya di Najd tetapi juga ke wilayah Hijaz dan sekitarnya. Dalam beberapa dekade, gerakan ini berhasil memperluas wilayah kekuasaan dengan menjadikan ajaran Wahhabi sebagai basis hukum dan moral masyarakat. Sejarawan David Commins mencatat bahwa "aliansi antara da'i dan amir ini merupakan titik balik dalam sejarah Islam di Jazirah Arab dan menandai lahirnya negara berbasis ideologi Wahhabiyah."

Implikasi dari aliansi ini bukan hanya religius, tetapi juga politis dan militer. Dakwah Wahhabiyah berkembang melalui pendekatan *amar ma'ruf nahi munkar* yang ketat, dan pelaksanaannya sering disertai dengan penegakan hukum yang tegas terhadap mereka yang dianggap menyimpang. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab dijadikan doktrin resmi negara, dan menjadi dasar bagi sistem hukum dan kebijakan sosial yang berlaku di wilayah kekuasaan Saudi.

Aliansi antara ulama dan penguasa ini menjadi model yang terus berlanjut dalam sejarah politik Arab Saudi. Bahkan ketika Dinasti Saudi mengalami keruntuhan dan bangkit kembali, hubungan simbiotik antara kekuasaan politik dan otoritas agama tetap dijaga. Hubungan ini kemudian menjadi ciri khas sistem pemerintahan Arab Saudi modern, di mana legitimasi kekuasaan sering kali diperoleh melalui dukungan dari kalangan ulama Wahhabi.

#### **4. Dampak Jangka Panjang Terhadap Arab Saudi Modern**

Pemikiran dan gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab tidak hanya memiliki pengaruh dalam konteks keagamaan abad ke-18, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas negara Arab Saudi modern. Ketika Dinasti Saudi kembali bangkit pada awal abad ke-20 di bawah kepemimpinan Abdul Aziz bin Saud, ideologi Wahhabi dijadikan sebagai fondasi moral dan spiritual negara yang baru. Dengan bersatunya Najd dan Hijaz di bawah bendera Arab Saudi pada tahun 1932, Wahhabisme diangkat menjadi dasar resmi bagi sistem hukum, pendidikan, dan kehidupan sosial di kerajaan tersebut.

Salah satu pengaruh paling nyata adalah dalam sistem hukum nasional, di mana hukum Islam berdasarkan interpretasi Mazhab Hanbali yang ketat—dengan pengaruh kuat pemikiran Wahhabi—diterapkan secara luas. Lembaga keulamaan seperti *Hai'ah Kibar al-'Ulama* (Dewan Ulama Senior) memiliki wewenang besar dalam menentukan kebijakan keagamaan dan sosial negara. Dalam praktiknya, Wahhabisme membentuk kerangka normatif yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, pendidikan agama, sampai penegakan moral publik.

Selain itu, pengaruh Wahhabisme juga terlihat dalam kurikulum pendidikan di Arab Saudi, yang selama beberapa dekade menekankan doktrin tauhid versi Muhammad bin Abdul Wahhab. Hal ini menghasilkan generasi yang dididik dengan orientasi keagamaan yang konservatif dan puritan, meskipun sejak era reformasi sosial pasca-2016, negara mulai melakukan penyesuaian terhadap sistem pendidikan dan kebijakan keagamaannya.

Namun, pengaruh Wahhabisme juga menjadi bahan kritik dari dalam dan luar negeri. Beberapa kalangan menilai bahwa ideologi ini telah digunakan sebagai alat kontrol sosial dan politik, serta dianggap turut memberi kontribusi terhadap lahirnya paham ekstremisme di beberapa bagian dunia Islam. Khaled Abou El Fadl mengkritik keras pendekatan Wahhabi yang menurutnya "memonopoli kebenaran keagamaan dan menolak pluralitas tafsir dalam Islam." Kritik semacam ini telah mendorong sebagian kalangan di Arab Saudi untuk melakukan reorientasi pemikiran keagamaan menuju pendekatan yang lebih terbuka dan kontekstual.

Dengan demikian, warisan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab telah menjadi pilar penting dalam sejarah dan politik Arab Saudi, namun juga menjadi bahan refleksi dan evaluasi dalam dinamika perubahan sosial di era modern. Warisan ini memperlihatkan kompleksitas antara agama dan kekuasaan, antara idealisme teologis dan realitas politik, yang terus berkembang seiring perubahan zaman.

#### **5. Kritik dan Kontroversi terhadap Wahhabisme**

Gerakan Wahhabiyah yang dirintis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak lepas dari berbagai kritik dan kontroversi, baik di kalangan ulama tradisional maupun pemikir Islam modern. Salah satu kritik utama adalah pendekatannya yang dianggap eksklusif dan intoleran terhadap keberagaman pemahaman dalam Islam. Wahhabisme menolak praktik-praktik seperti ziarah kubur, tawassul, dan penghormatan terhadap wali, yang selama berabad-abad diterima sebagai bagian dari tradisi Islam oleh berbagai kalangan umat. Penolakan ini sering kali diiringi oleh tuduhan syirik terhadap kelompok yang berbeda, yang menciptakan polarisasi di kalangan umat Islam.

Khaled Abou El Fadl menyatakan bahwa gerakan Wahhabi berupaya "memonopoli tafsir keislaman dan mengecilkan peran ijtihad yang pluralistik dalam tradisi Islam." Ia melihat Wahhabisme sebagai bentuk "pencurian besar" (great theft) terhadap kekayaan intelektual Islam yang multivokal. Pandangan ini menunjukkan bahwa kritik terhadap Wahhabisme bukan hanya berasal dari dimensi teologis, tetapi juga epistemologis—yakni bagaimana kebenaran agama didefinisikan dan dijustifikasi.

Selain itu, Wahhabisme juga dikaitkan dengan kemunculan gerakan ekstremis kontemporer yang menggunakan retorika tauhid dan pemurnian sebagai justifikasi kekerasan. Meski negara Arab Saudi secara resmi membantah keterkaitan langsung antara Wahhabisme dan terorisme, sejumlah peneliti Barat dan Timur Tengah tetap menyoroti kesamaan ideologis yang digunakan oleh kelompok-kelompok radikal. Dalam konteks ini, kritik terhadap Wahhabisme tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berkaitan dengan dampaknya terhadap stabilitas sosial dan politik global.

Di sisi lain, sebagian kalangan melihat bahwa kritik terhadap Wahhabisme kerap bersifat politis dan dilebih-lebihkan. Mereka menekankan bahwa Wahhabisme pada dasarnya adalah bentuk pemurnian tauhid yang sah dalam Islam dan telah membawa transformasi moral di Jazirah Arab. Namun, perdebatan ini menunjukkan bahwa posisi Wahhabisme dalam sejarah Islam tetap problematik, menjadi sumber inspirasi sekaligus kontroversi, dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan serta perubahan zaman.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Wahhabisme bukan sekadar gerakan reformasi keagamaan, tetapi juga telah mengalami institusionalisasi sebagai ideologi negara yang membentuk sistem politik, hukum, dan sosial Arab Saudi. Transformasi ini bukan terjadi secara alami, melainkan melalui proses historis yang sangat dipengaruhi oleh aliansi strategis antara ulama (Muhammad bin Abdul Wahhab) dan penguasa (Muhammad bin Saud).

Secara teologis, Wahhabisme menekankan tauhid murni dan penolakan terhadap semua bentuk bid'ah, khurafat, dan syirik. Namun, doktrin ini kemudian menjadi alat legitimasi kekuasaan politik Dinasti Saud. Hal ini terlihat dalam bagaimana lembaga keagamaan negara (seperti Hai'ah Kibar al-'Ulama dan Kementerian Urusan Islam) secara aktif mendefinisikan bentuk Islam yang "resmi" dan sesuai dengan doktrin Wahhabi. Analisis ini memperkuat pandangan Madawi Al-Rasheed (2010), yang menyatakan bahwa Wahhabisme adalah proyek ideologis negara, bukan hanya teologi.

Di sisi lain, perlu dicatat bahwa kekuasaan Wahhabisme tidak bersifat mutlak dan mengalami fluktuasi. Reformasi sosial dan keagamaan yang dilakukan oleh Mohammed bin Salman sejak 2016 menjadi indikasi adanya pembelokan dari dominasi Wahhabisme, menuju model Islam yang lebih moderat. Pembatasan kekuasaan polisi syariah (mutawwi'in), dibukanya ruang publik untuk perempuan, dan promosi "Islam moderat" adalah contoh nyata dari upaya dekonstruksi Wahhabisme dalam kebijakan negara kontemporer.

Dari perspektif global, penyebaran Wahhabisme melalui pendanaan lembaga-lembaga keislaman di luar negeri mendapat kritik tajam karena dianggap turut menyebarkan paham puritan dan intoleran. Namun, analisis mendalam menunjukkan bahwa tidak semua bentuk salafisme bersifat radikal. Sebagian besar merupakan salafi quietist (pasif secara politik), meskipun dalam konteks tertentu, doktrin Wahhabi memang dapat menjadi basis legitimasi ideologi ekstremis.

Dalam konteks keislaman kontemporer, Wahhabisme menghadapi tantangan besar: antara mempertahankan kemurnian ajaran versi awal, atau melakukan reinterpretasi agar lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman. Inilah yang disebut oleh Khaled Abou El Fadl sebagai konflik antara "Islam tradisional" dengan "Islam otoriter."

## **KESIMPULAN**

Pembaruan yang dirintis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad ke-18 di Jazirah Arab merupakan respons terhadap kondisi sosial-keagamaan umat Islam yang saat itu dinilai telah jauh menyimpang dari ajaran tauhid yang murni. Dengan menolak praktik-praktik keagamaan yang bercampur

dengan unsur lokal seperti pemujaan terhadap wali, penggunaan jimat, dan ziarah kubur berlebihan, ia menyerukan kembalinya umat kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai satu-satunya otoritas agama. Pemikiran ini membentuk basis dari gerakan Wahhabiyah yang tidak hanya berpengaruh dalam bidang teologi, tetapi juga mengubah dinamika politik kawasan melalui aliansi dengan Muhammad bin Saud.

Gerakan ini kemudian berkembang menjadi fondasi ideologis dari terbentuknya Negara Saudi Pertama, dan terus memengaruhi struktur negara Arab Saudi hingga hari ini. Wahhabisme dijadikan pijakan utama dalam sistem hukum, pendidikan, serta kebijakan moral masyarakat. Meskipun demikian, pengaruh yang luas ini juga memicu berbagai kritik, terutama karena pendekatannya yang dianggap rigid dan eksklusif terhadap keberagaman tafsir Islam.

Kritik terhadap Wahhabisme menyoroti kecenderungannya untuk menolak pluralitas dalam Islam serta keterkaitannya, meskipun secara tidak langsung, dengan munculnya kelompok-kelompok radikal. Di sisi lain, pendukung gerakan ini melihatnya sebagai pembaruan otentik yang berupaya mengembalikan umat kepada tauhid sejati. Oleh karena itu, pembaruan Muhammad bin Abdul Wahhab menimbulkan dialektika penting dalam sejarah Islam kontemporer—antara reformasi dan konservatisme, antara pemurnian dan otoritarianisme.

Dengan mengkaji perjalanan intelektual dan dampak historis dari gerakan ini, artikel ini menunjukkan bahwa reformasi keagamaan tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa. Ia selalu berinteraksi dengan kekuasaan, struktur sosial, dan konteks zaman. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab tidak bisa hanya dilihat sebagai respons teologis, tetapi juga sebagai kekuatan transformasional yang membentuk wajah Islam politik modern, khususnya di Arab Saudi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, Khaled. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. New York: HarperOne, 2005.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.
- Agustono, Ihwan. "Islamic Puritanism Movement of Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab." *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 16, no. 2 (2022): 101–118.
- Al-Hawas, Fahd. "Diriyah Pact." Wikipedia. Accessed June 13, 2025. [https://en.wikipedia.org/wiki/Diriyah\\_pact](https://en.wikipedia.org/wiki/Diriyah_pact).
- Al-Rasheed, Madawi. *A History of Saudi Arabia*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Bayram, Aydin. "The Rise of Wahhabi Sectarianism and Its Impact in Saudi Arabia." *Religions* 13, no. 4 (2022): 340. <https://www.mdpi.com/2077-1444/13/4/340>.
- Commins, David. *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. London: I.B. Tauris, 2006.
- Farouk, Yasmine. "The King's Dilemma: Saudi Arabia's Reform Gamble." *Carnegie Endowment for International Peace*, 2020.
- Ibn Abdul Wahhab, Muhammad. *Kitab at-Tauhid*. Riyadh: Darussalam, 1996.
- Kepel, Gilles. *Jihad: The Trail of Political Islam*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.
- Lam, Leon. "Wahhabism and Saudi Arabia: Emergence, Development, and Future." *Academia.edu*. Accessed June 13, 2025. <https://www.academia.edu/29499157>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

- Tosh, John. *The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History*. 6th ed. London: Routledge, 2015.
- Wiktorowicz, Quintan. "Anatomy of the Salafi Movement." *Studies in Conflict & Terrorism* 29, no. 3 (2006): 207–23

